



PENGELOLAAN & PENGEMBANGAN POTENSI SUMBERDAYA PESISIR PROVINSI BANTEN

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Banten merupakan provinsi yang berada di ujung barat Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat disebelah timur, dan Samudra Hindia di Selatan. Letak Geografisnya membuat Provinsi Banten menjadi salah satu jalur laut potensial meliputi jalur perdagangan yang melewati Selat Sunda, jalur perlintasan atau penghubung dua pulau besar yaitu Pulau Jawa dengan Sumatera, dan lokasi industri ptensial sebagai daerah yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Provinsi Banten merupakan wilayah pesisir yang kaya akan sumber daya lautnya.

Dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, wilayah pesisir dan sektor kelautan juga memiliki peranan penting sehingga perlu menjadi salah satu sektor prioritas utama. Setiap pembangunan daerah perlu adanya acuan atau peraturan agar pembangunan daerah lebih terarah. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa daerah provinsi diberi kewenangan mengelola sumber daya laut di wilayahnya. Pengelolaan sumber daya laut tersebut mengacu pada sebuah peraturan daerah yang dituangkan pada Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Topologi wilayah kepebisiran dalam hal ini adalah tipe dan karakteristik pesisir yang ada di Provinsi Banten. Berdasarkan tipe dan karakteristik wilayah pesisir ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam melakukan kajian sumberdaya alam dan manusia yang ada dikawasan pesisir Provinsi Banten. Setiap tipe dan karakter pesisir tentunya memiliki jenis sumberdaya dan kesesuaian rencana pengembangan tertentu. Karena ciri, tipe, dan karakteristik wilayah kepebisiran yang khas tersebut, kedepan hendaknya disusun suatu bentuk kajian yang lebih mendalam agar rencana kebijakan dan program pengembangan wilayah pesisir lebih terarah dan tepat sasaran. Wilayah kepebisiran erat kaitannya dengan panjang garis pantai yang dimiliki Provinsi Banten. Garis pantai di Provinsi Banten membentang mulai dari Kabupaten Tangerang di sisi utara yang menghadap Lauta jawa kea rah barat sampai ke Kabupaten Lebak di bagian selatan yang menghadap Samudera Hindia. Panjang total garis pantai sekitar 499,62 Km dan ditambah dengan garis pantai yang termasuk pulau-pulau kecil sepanjang 866,13 Km. Panjang garis pantai yang sangat panjang tersebut membuka peluang adanya pengembangan potensi sumberdaya alam kepebisiran di wilayah Provinsi Banten. Penekanan kedepan hendaknya sudah dimulai kajian yang lebih detail sampai kedalam skala desa pesisir, agar komoditas unggulan dan potensi yang layak dikembangkan mampu diidentifikasi dengan baik.

Provinsi Banten juga menjadi pintu masuk para wisatawan mancanegara menuju Indonesia, mengingat mudahnya aksesibilitas menuju Provinsi Banten. Akses udara, laut, dan darat sangat terbuka dan didukung dengan adanya saran dan prasarana yang memadai. Beberapa data terkait dengan wisatawan dan tujuan wisata dari para wisatawan nusantara (wisnus). Untuk data wisnus yang melakukan

perjalanan, Provinsi Banten menempati posisi lima besar provinsi utama penyumbang wisnus di Indonesia. Dan juga sebagai tujuan utama wisnus, Provinsi Banten menempati posisi kesembilan sebagai provinsi tujuan utama wisnus. Sedangkan untuk posisi satu dan dua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur.

B. Pembahasan

1. Potensi Sumberdaya Alam Ekosistem Mangrove, Terumbu Karang, dan Padang lamun

Diperlukan suatu usaha dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya pesisir mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Ekosistem alami pesisir dan laut sebaiknya terus terjaga dan terhindar dari kerusakan. Kerusakan ekosistem alami di kawasan pesisir akan berdampak buruk pada pengembangan sektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, tambak, maupun bentuk dan fungsi budidaya lain di kawasan pesisir. Kedepan, sangat perlu diupayakan berupa kajian identifikasi actual mengenai kondisi, fungsi, dan rencana tindakan konservasi dan pengembangan ekosistem alami di kawasan pesisir Provinsi Banten.

2. Potensi Kepariwisata

Provinsi Banten memiliki 7 daya tarik wisata prioritas yang disebut dengan “Banten Seven Wonders” dan menjadi fokus bagi pengembangan dan pemasaran daya tarik wisata diwilayahnya. 7 daya tarik wisata unggulan Provinsi Banten tersebut terdiri dari 7 daya tarik wisata prioritas yang ada, 3 diantaranya berada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, yaitu destinasi wisata Tanjung Lesung, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Desa Adat Baduy.

Keberadaan daya tarik utama ini diharapkan dapat menjadi pemantik dari perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Banten.

Selain 7 daya tarik wisata utama yang ada di Provinsi Banten masih terdapat juga daya tarik lain yang tersebar di keseluruhan wilayah Provinsi Banten. Berikut merupakan daftar daya tarik wisata yang terbagi ke dalam daya tarik wisata alam, budaya dan buatan.

3. Kelayakan Ekonomi Kepariwisata

Bertambahnya pengunjung dengan spending power yang mengikutinya akan memberikan dampak langsung maupun dampak tidak langsung, serta dampak ikutan pada ekonomi masyarakat dalam output, pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat dari bertambahnya kunjungan wisatawan ke Provinsi Banten yang akan sebanding dengan meningkatnya pengeluaran untuk makanan, minuman, transportasi, akomodasi dsb dapat meningkatkan daya beli yang ada di Provinsi Banten.

Dampak lain yang dapat dirasakan adalah dari adanya penambahan uang masuk dikawasan wisata dengan adanya peningkatan gaji karyawan yang secara teoritik dapat berimbas pada peningkatan daya beli masyarakat dan dapat memberikan efek secara tidak langsung bagi perkembangan kegiatan ekonomi yang ada di kawasan wisata Provinsi Banten. Sebagai contoh, berikut adalah ilustrasi tentang distribusi pendapatan sektor ekonomi dari adanya perkembangan kegiatan wisata di kawasan Tanjung Lesung mulai dari dampak yang dirasakan secara langsung, dampak yang dirasakan secara tidak langsung, maupun dampak ikutan yang menyertainya.

4. Kelayakan Sosial Kepariwisataan

Pada dasarnya setiap masyarakat memiliki respon yang berbeda-beda terhadap perkembangan kegiatan wisata yang ada di wilayahnya. Respon ini bergantung dari penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata itu sendiri. Di sisi lain keterlibatan atau partisipasi masyarakat di dalam industri pariwisata juga menjadi faktor penting dalam penerimaan masyarakat terhadap kegiatan wisata di wilayahnya.

Dampak sosial dalam pengembangan aktivitas wisata pada dasarnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pembaharuan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang berbasis industri kreatif dan harus berdasarkan potensi lokal.
- b) Fenomena gentrifikasi yang merupakan efek jangka panjang yang menandakan perubahan ekonomi, sosial, maupun budaya di wilayah tertentu yang tercipta akibat naiknya harga lahan/sewa lahan sehingga warga atau penyewa bergeser ke area dengan biaya sewa lahan yang lebih murah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa warga lokal yang tidak dapat bersaing harus berpindah dari wilayah tempat tinggalnya.
- c) Pembaharuan berbasis budaya tidak secara otomatis akan memiliki dampak sosial yang positif.

Dampak sosial dan budaya dari suatu aktivitas wisata pada dasarnya adalah prediksi selisih kondisi sosial dan budaya masyarakat pada saat sebelum dan sesudah adanya intervensi kegiatan wisata di Provinsi Banten. Apabila kondisi sosial dan budaya masyarakat di Provinsi Banten menjadi lebih baik setelah adanya intervensi kegiatan wisata dari pada masa sebelum adanya intervensi, maka hal ini berarti menunjukkan dampak positif di

dalam segenap aspeknya dan dapat dikatakan layak secara sosial dan ekonomi.

5. Kawasan Minapolitan

Konsep Kawasan Minapolitan adalah wilayah yang berbasis pada keanekaragaman fisik dan ekonomi kelautan yang memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu dengan yang lainnya secara fungsional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepmen No18 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Minapolitan menjelaskan bahwa melalui konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

C. Kesimpulan

Sumber daya agraria di Indonesia sangatlah melimpah dan terdiri dari berbagai kelompok/sektor antara lain kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan. Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian mengingat Indonesia ialah negara maritim. Indonesia memiliki garis pantai 95.181 kilometer, posisi geografis di antara dua samudera², dan berada di sepanjang garis khatulistiwa. Ini menjadikan Indonesia sangat strategis dalam perspektif global dan memiliki keragaman sumber daya alam yang melimpah. Dengan posisi

ini, bidang kelautan dan perikanan, termasuk sumber daya air yang terdapat di dalamnya tidak akan bisa terlepas dikarenakan semuanya mengelilingi Indonesia dan sekaligus menjadi batas wilayah negara.

Selain posisi yang strategis, sumber daya pesisir dan laut di Indonesia memiliki peranan penting dalam menunjang ekonomi Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam laporannya tahun 2015 mengemukakan sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia menyimpan berbagai potensi³: (1) sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, mangrove, energi gelombang, pasang surut, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion); (2) sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain potensi alam yang dapat dimanfaatkan, terdapat juga potensi pengusahaan di bidang jasa dan pembangunan kelautan seperti wisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Selain itu, dalam wilayah perairan Indonesia terdapat pulau-pulau kecil yang menyimpan potensi untuk dilindungi, dimanfaatkan dan/atau diusahakan. Terdapat juga pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang menjadi batas wilayah Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki 42 PPKT yang berpenduduk dan 69 PPKT tidak berpenduduk.⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan pemenuhan Dukungan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan untuk pengembangan PPKT. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir dan Laut Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan, utamanya pada tingkatan undang-undang. Indonesia telah memiliki beberapa pengaturan terkait dengan undang-undang yang secara spesifik/berkaitan langsung dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maupun undang-undang sektoral lainnya yang memiliki

ketentuan terkait WP3K di dalamnya. Untuk memahami lebih dalam mengenai dasar pengaturan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut, selanjutnya dilakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut.

Dalam RZWP-3-K, ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan pemanfaatan umum salah satunya ditujukan untuk pariwisata. Untuk itu, rezim pengaturan UU Kepariwisata menjadi relevan sebagai salah satu pengaturan yang perlu diacu dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya alam di wilayah pesisir dan laut Provinsi Banten. Dalam konteks urusan pemerintahan, urusan pemerintahan di bidang pariwisata merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan. Berkaitan dengan kewenangan Daerah Provinsi, hal yang perlu menjadi perhatian penting adalah mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Rencana Induk tersebut menjadi landasan utama dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Provinsi.